

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA
DI DESA ROMBO KECAMATAN KULISUSU
KABUPATEN BUTON UTARA**

ARIANI

**Sundi Komba
H. Darpin**

Ariani@gmail.com

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS HALU OLEO
KENDARI
2018**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Desa Rombo Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara dengan tujuan untuk memberikan gambaran implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Rombo Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana dan dalam rangka keberhasilan implementasi kebijakan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dimana instrumen utama dalam penelitian adalah peneliti sendiri. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi empiris implementasi Kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Rombo Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara belum berjalan cukup lancar. Hal tersebut dapat dilihat dari dimensi organisasi yang dimana organisasi seperti Karang Taruna belum dilibatkan dalam penyusunan rencana kegiatan, juga terkait dengan Dimensi interpretasi belum berjalan dengan baik karena Pemerintah desa tidak transparan dalam penyusunan rencana kegiatan Alokasi Dana Desa, selain itu Dimensi aplikasi (penerapan) program belum dilakukan secara rutin. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Rombo Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara di dasarkan pada teori implementasi kebijakan oleh Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berangkat dari permasalahan dan teori serta analisis dan pembahasan penelitian, maka Pemerintah Desa Rombo Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara, disarankan untuk melakukan komunikasi kebijakan Alokasi Dana Desa secara berkesinambungan, konsisten dan jelas, mempersiapkan seluruh sumber daya baik staf, informasi, kewenangan, serta sarana dan prasarana untuk mendukung sepenuhnya kebijakan baik secara lisan maupun tertulis melalui individu

maupun institusi serta kelembagaan, dan mendorong Pemerintah Desa untuk menyusun uraian tugas berkaitan dengan kebijakan dan menyusun standarisasi pekerjaan dipemerintah desa melalui *Standar Operating Procedures* (SOP) Alokasi Dana Desa secara terintegrasi.

Kunci : Implementasi Kebijakan, Alokasi Dana Desa (ADD)

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakekatnya tujuan pembangunan suatu negara dilaksanakan adalah untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan Negara Indonesia. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya.

Dalam era otonomi sekarang ini, pembangunan kini telah dimulai dari level pemerintahan terendah, yakni desa. Pembangunan desa perlu menjadi prioritas mengingat desa memiliki karakteristik permasalahan yang selalu membelit desa dan cenderung telah menjadi stigma bagi desa, misalnya: Pertama, Desa memiliki APBDesa yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. Kedua, kesejahteraan masyarakat desa rendah sehingga susah bagi Desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang tinggi. Ketiga, masalah itu diikuti oleh rendahnya dana operasional Desa untuk menjalankan pelayanan. Keempat, Tidak kalah penting bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya sebagian kecil yang melibatkan masyarakat (Bambang, Hidayana, 2005) dalam Jusman (2016).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Rombo Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara?
2. Bagaimanakah faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Rombo Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Rombo Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Rombo Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari segi Teoritis hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan

dalam permasalahan Alokasi Dana Desa serupa, sebagai bahan kajian bagi pihak yang terkait dengan kebijakan ini sehingga dapat mengoptimalkan keberhasilan kebijakan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dalam memahami keadaan wilayahnya dalam hal ini desa dimana mereka berada, menambah wawasan pengetahuan tentang kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah, serta dapat membantu dan bekerjasama dalam pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan daerah ataupun masyarakat itu sendiri.
- b. Bagi pemerintah sebagai bahan masukan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang Alokasi Dana Desa sehingga dapat lebih memahami dan meningkatkan kinerja serta pelaksanaannya demi untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Rombo.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kebijakan Publik

Menurut Anderson dalam Subarsono (2005: 2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah sehingga akan menjadi lebih menarik untuk mengetahui pengaruh serta kontribusi Alokasi Dana Desa didalam peningkatan kualitas sumber daya dan kesejahteraan masyarakat desa serta penyelenggaraan Pemerintah Desa ditengah menurunnya perolehan Alokasi Dana Desa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

B. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik, sering bertentangan dengan yang diharapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan itu sebagai batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri. Itulah sebabnya implementasi kebijakan publik, diperlukan pemahaman mendalam tentang studi kebijakan publik, yang menurut Djadja Saefullah dalam prakatanya pada buku Tachjan (2006: ix) bahwa studi kebijakan publik tersebut dapat dipahami dari dua perspektif, Yakni:

1. Perspektif politik, bahwa kebijakan publik didalamnya perumusan, implementasi, maupun evaluasinya pada hakekatnya merupakan pertarungan berbagai kepentingan publik didalam mengalokasikan dan mengelola sumberdaya (*resources*) sesuai dengan visi, harapan dan prioritas yang ingin diwujudkan.
2. Perspektif administrasi, bahwa kebijakan publik merupakan ikhwal berkaitan dengan sistem, prosedur dan mekanisme, serta kemampuan para pejabat publik (*official officers*) didalam menterjemahkan dan menerapkan kebijakan publik, sehingga visi dan harapan yang diinginkan dicapai dapat diwujudkan didalam realitas.

C. Konsep Alokasi Dana Desa

Menurut Maryunani (2002: 902) "Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya

agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”. Berdasarkan pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa desa mempunyai hak mendapatkan alokasi dana desa untuk meyelenggarakan pemerintahan desanya, salah satunya adalah untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat didesanya masing-masing.

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Dalam Subarsono, (2005: 90) dijelaskan bahwa model implementasi kebijakan yang memiliki perspektif *top down* dikembangkan oleh George C. Edwards III menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi (sikap) dan Struktur birokrasi.

E. Kerangka Pikir

Implementasi suatu kebijakan dapat dilihat dari beberapa hal seperti organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Untuk mencapai suatu keberhasilan dalam suatu implementasi maka dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Rombo Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara yang melaksanakan kebijakan Alokasi Dana Desa. Adapun pertimbangan penetapan lokasi penelitian ini dikarenakan desa Rombo masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa.

B. Informan Penelitian

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* dengan pertimbangan bahwa kesemua informan tersebut adalah orang-orang yang memahami betul persoalan Alokasi Dana Desa di Desa Rombo Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara. Adapun pengklasifikasian dari keseluruhan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Bendahara Desa
4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
5. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
6. Karang Taruna
7. Masyarakat

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang akan diambil dan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara Pemerintah dan para informan di Desa Rombo Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara berupa informasi tentang implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa.

2. Data sekunder adalah data yang berasal dari Kantor Desa berupa keterangan-keterangan serta laporan-laporan atau dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan yang menjadi sumber penelitian yang berkaitan dengan Kebijakan Dana Desa.

D. Teknik Pengumpulan Data

Upaya mengumpulkan data agar menghasilkan data dari informasi serta analisis yang baik dan bermutu, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan (*Library research*)
Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data melalui kajian terhadap dokumen-dokumen, teori-teori, undang-undang, dan kebijakan pemerintahan yang ada untuk kemudian diambil sebagai data yang diperlukan bagi proses penelitian
2. Studi lapangan (*Field research*)
Studi lapangan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke objek penelitian untuk memperoleh datanya dengan informasi yang akurat dan asli. Adapun teknik perolehan datanya, sebagai berikut:
 - a. Wawancara yaitu wawancara langsung dengan informan terkait dengan kepentingan dalam penelitian dan menggunakan pedoman wawancara untuk memperoleh penjelasan yang rinci dan mendalam mengenai implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di desa Rombo Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara.
 - b. Observasi yaitu merupakan teknik pengumpulan informasi melalui pengamatan pada proses penelitian sedang berjalan. Observasi dalam penelitian ini meliputi data tentang kondisi fisik bangunan hasil kegiatan Alokasi Dana Desa.
 - c. Dokumentasi adalah pengambilan data melalui laporan-laporan beserta dokumen-dokumen yang telah tersedia di desa Rombo Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yakni untuk mendapatkan gambaran secara sistematis tentang implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Rombo Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara, yang mengacu pada konsep Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2012: 246) yaitu menggambarkan secara sistematis dan mendalam setiap masalah yang ditelaah. Analisis yang berlangsung melalui empat tahap yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

F. Definisi Konsep

Adapun definisi konsep dari penelitian ini untuk memberikan suatu pemahaman agar memudahkan penelitian, maka penulis memberikan beberapa batasan penelitian, dan fokus penelitian ini yang dioperasionalkan melalui beberapa indikator sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan untuk memahami apa yang nyata-nyata terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan negara, baik itu usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat.
 - a. Organisasi
merupakan unit yang digunakan untuk melakukan pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode agar program terlaksana
 - b. Interpretasi
merupakan aktivitas penterjemahan program ke dalam pengaturan dan pengarahan yang dapat diterima dan dilaksanakan secara tepat
 - c. Aplikasi
merupakan konsekuensi berupa pemenuhan perlengkapan serta biaya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan program
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keberhasilan implementasi kebijakan yang ditentukan oleh banyak faktor, dan masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain.
 - a. Komunikasi
Komunikasi adalah sarana untuk menyebarluaskan informasi, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas
 - b. Sumber daya
Sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia
 - c. Disposisi atau Sikap
Berkaitan dengan bagaimana sikap implementor dalam mendukung suatu implementasi kebijakan. Seringkali para implementor bersedia untuk mengambil inisiatif dalam rangka mencapai kebijakan, tergantung dengan sejauh mana wewenang yang dimilikinya
 - d. Struktur birokrasi
Suatu kebijakan seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Rombo

Latar belakang Desa Rombo adalah dari pemekaran Kelurahan Lemo. Dan pada zaman dahulu Kelurahan Lemo berupa hutan dipesisir pantai. Awal mulanya masih berstatus desa, kemudian berdasarkan keputusan Presiden No. 55 Tahun 1980 berubah status menjadi kelurahan. Asal kata Lemo dipetik dari sebuah

sejarah kebudayaan leluhur yang dikenal dengan MIAM PUU atau dikenal dengan nama Raha Mpuu. Kedua istilah ini mempunyai pengertian bahasa yang sama yaitu keluarga pertama yang memulai kehidupan dan mendiami wilayah ini.

2. Kondisi Geografis

Desa Rombo merupakan salah satu dari 16 desa yang berada di wilayah Kecamatan Kulisusu yang secara administrasi berada di wilayah Kabupaten Buton Utara. Desa Rombo mempunyai luas wilayah sekitar ± 4.5 .

Secara administratif wilayah Desa Rombo berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Linsowu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Lemo
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lemo Ea
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pantai/Laut

3. Kondisi Penduduk

Penduduk Desa Rombo berdasarkan data penduduk Tahun 2015 berjumlah 761 jiwa yang terdiri dari laki-laki 371 jiwa dan perempuan 390 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 184 yang terdiri atas 2 (Dua) Dusun yaitu Dusun I dan Dusun II.

4. Kondisi Sosial

a. Pendidikan

Pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas sebagai modal utama pembangunan bangsa. Dalam hal ini, tingkat pendidikan yang diterima oleh suatu masyarakat yang memiliki pendidikan formal maupun non formal yang nantinya dapat mempengaruhi kemampuan berpikir dan bertindak lebih dinamis dibandingkan dengan masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah atau tidak memiliki pendidikan sama sekali.

b. Budaya dan Agama

Kebudayaan masyarakat dalam suatu daerah adalah bagian dari modal sosial dan pondasi utama dalam pembangunan. Sehingga pemahaman akan kebudayaan suatu masyarakat secara terpadu dan komprehensif merupakan suatu keharusan agar pembangunan yang tercipta tidak bertentangan dengan kearifan lokal masyarakat suatu daerah.

Warga masyarakat Desa Rombo merupakan warga yang majemuk terdiri dari beberapa agama namun demikian agama Islam lebih dominan di anut oleh warga desa Rombo.

5. Kondisi Perekonomian

a. Mata Pencaharian

Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Rombo adalah Petani dan Nelayan. Hal ini disebabkan karena sudah turun temurun sejak dulu bahwa masyarakat adalah petani dan nelayan yang juga minimnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya tidak punya pilihan lain selain menjadi petani dan Nelayan.

b. Pola penggunaan tanah

Penggunaan tanah di Desa Rombo sebagian besar diperuntukkan untuk tanah perkebunan sedangkan sisanya adalah laut yang menjadi mata pencaharian terbesar didesa ini.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa

Dalam implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

a. Organisasi

Organisasi dalam konteks implementasi kebijakan merupakan aktivitas untuk membentuk badan-badan, unit-unit, beserta metode-metode yang diperlukan guna mencapai tujuan-tujuan yang terkandung di dalam kebijakan. Organisasi juga merupakan kesatuan orang-orang yang melakukan pekerjaan dalam ruang lingkup administrasi.

b. Interpretasi

Interpretasi merupakan penafsiran agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Interpretasi dari para pelaksana kebijakan harus mengetahui dengan baik mengenai substansi kebijakan, makna kebijakan, dan tujuan kebijakan agar penafsiran ini tidak menyimpang dari kebijakan tersebut dan tidak terjadi kebingungan mengenai apa yang akan dilakukan oleh para pelaksana kebijakan, mereka yang menerapkan keputusan haruslah tahu apa yang seharusnya mereka lakukan, sehingga para pelaksana dapat mengetahui dengan pasti tujuan apa yang hendak dicapai dalam implementasi kebijakan tersebut.

c. Aplikasi

Aplikasi ialah penerapan secara rutin dari segala keputusan dan peraturan-peraturan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk tercapainya tujuan kebijakan. Keputusan Program-program yang telah direncanakan diterapkan secara rutin dengan satu tujuan agar program-program tersebut dapat terealisasi dengan baik.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa dapat disampaikan pada hasil penelitian sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses terjadinya interaksi penyampaian pesan melalui mediator. Pengaruh faktor komunikasi terhadap implementasi adalah pada kejelasan dan isi pesan untuk dapat dipahami secara menyeluruh oleh penerima pesan atau program. Dalam faktor komunikasi ini, akan dilihat dari berbagai fenomena yang diamati penulis dilapangan terkait dengan proses implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa.

2. Sumber Daya

Dijelaskan pada bab II bahwa sumber daya merupakan unsur yang terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya non manusia, yang secara nyata dan potensial dapat digunakan untuk meningkatkan suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pengambil kebijakan itu sendiri, secara khusus sumber daya manusia merupakan aspek yang sangat penting karena manusia sendiri sangat mudah dipengaruhi oleh faktor luar maupun faktor dalam sehingga dalam menjalankan suatu kebijakan sangat perlu adanya pengalaman baik dari dalam maupun dari luar, ditambah lagi sifat-sifat manusia yang terkadang bisa berubah saat

dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik dan ekonomi. Dalam suatu implementasi kebijakan menurut teori Edward III sumber daya terdiri dari staf, informasi, wewenang dan fasilitas.

3. Disposisi

Salah satu aspek penting lainnya selain komunikasi dan sumber daya adalah aspek dari siapa pelaksana kebijakan itu sendiri atau disposisi karena berhubungan dengan implementor dalam melaksanakan kebijakan itu sendiri. Pengaruh dan sikap pelaksana kebijakan atau disposisi terhadap suatu kebijakan sangat besar sekali karena jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku para pelaksana berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dapat dibedakan menjadi dua arti yang berbeda yang pertama adalah struktur yang secara umum dapat dipahami sebagai sekumpulan variable yang masing-masing dapat berbeda tipe dan dikelompokkan kedalam satu nama, struktur membantu mengatur segala yang tergabung didalam satu tempat untuk menjalankan tugasnya masing-masing.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Rombo Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara belum berjalan cukup lancar. Hal tersebut dapat dilihat dari dimensi organisasi yang dimana organisasi seperti Karang Taruna belum dilibatkan dalam penyusunan rencana kegiatan, juga terkait dengan Dimensi interpretasi belum berjalan dengan baik karena Pemerintah desa tidak transparan dalam penyusunan rencana kegiatan Alokasi Dana Desa, selain itu Dimensi aplikasi (penerapan) program belum dilakukan secara rutin
2. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Rombo adalah komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi
 - a. Komunikasi dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:
 - Aspek transmisi
Bahwa dilihat dari aspek transmisi, kebijakan Alokasi Dana Desa telah disampaikan dan disebar oleh instansi terkait dan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Buton Utara
 - Aspek konsistensi
Bahwa dilihat dari aspek konsistensi, Pemerintah Kabupaten Buton Utara telah mengkomunikasikan kebijakan Alokasi Dana Desa secara konsisten, terus-menerus dan berkesinambungan

- Aspek kejelasan
Bahwa dilihat dari aspek kejelasan, petunjuk teknis tentang pelaksanaan Alokasi Dana Desa telah disampaikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Buton Utara dan instansi terkait
- b. Sumber daya dalam implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:
 - Aspek sumber daya staf
Bahwa dilihat dari aspek sumber daya staf pada dasarnya sudah mampu menjalankan tugasnya untuk melaksanakan kebijakan Alokasi Dana Desa, tetapi masih sangat perlu untuk ditingkatkan lagi melalui pendidikan dan pelatihan, serta bimbingan teknis bagi Kepala Desa dengan Perangkatnya serta Badan Permusyawaratan Desa.
 - Aspek sumber daya Informasi
Bahwa dilihat dari aspek sumber daya informasi, penyampaian informasi yang dilaksanakan oleh pengambil kebijakan dan instansi terkait sudah berjalan sebagaimana mestinya dan perlu untuk dipertahankan dan ditingkatkan lagi.
 - Aspek sumber daya wewenang
Bahwa dilihat dari aspek sumber daya wewenang, Desa Rombo belum memiliki uraian tugas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Desa itu sendiri dalam mencapai tujuan.
 - Aspek sumber daya perlengkapan (fasilitas)
Bahwa dilihat dari aspek sumber daya perlengkapan (fasilitas), salah satu penyebab utama tidak maksimalnya pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Rombo disebabkan oleh tidak memadai dan tidak layaknya perlengkapan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan di Desa Rombo.
- c. Disposisi
Bahwa dilihat dari aspek disposisi, seluruh elemen Pemerintah Desa baik Kepala Desa maupun Perangkat Desa menerima dan mendukung implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Rombo.
- d. Bahwa dilihat dari aspek struktur organisasi, Desa Rombo belum memiliki SOP berkaitan dengan kebijakan Alokasi Dana Desa sehingga tidak ada standarisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dan pekerjaan menjadi tidak efektif dan efisien.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Rombo Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara masa yang akan datang. Saran-saran yang dimaksud adalah:

1. Seluruh SPKD terkait yang mempunyai tugas bersentuhan langsung dengan kebijakan Alokasi Dana Desa, hendaknya meningkatkan sumber daya

- manusia melalui pendidikan dan pelatihan, serta bimbingan teknis bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa.
2. Pemerintah Kabupaten Buton Utara hendaknya meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di desa yang sampai dengan saat ini kondisinya masih kurang memadai dan masih sangat membutuhkan sarana dan prasarana guna meningkatkan kinerja Perangkat Desa melalui bantuan pembangunan gedung.
 3. Pemerintah Kabupaten Buton Utara hendaknya meningkatkan sarana dan prasarana untuk membuat SOP dalam melaksanakan pekerjaan, agar terciptanya standarisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing melalui pembuatan petunjuk teknis atau pedoman penyusunan SOP bagi desa di Kabupaten Buton Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Amirullah, Budiyo, H. 2004. *Pengantar Manajemen*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Antoly, H. 2003. *Kerangka Hukum Pemerintahan Desa*. Fisip UI, Jakarta.
- Baratakusumah, DS. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi menggali potensi dalam mewujudkan otonomi daerah*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Maryunani. 2002. *Alokasi Dana Desa*. LPEPM UI, Jakarta.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Pasolog, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: CV. Alfabeta
- Sahdan, Gregorius. Iswari, Paramita. & Zamroni, Sunaji. 2007. *ADD untuk Kesejahteraan Rakyat Desa*. FPPD, Yogyakarta
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit AIPI Bandung-Puslit KP2W lemlit UNPAD
- Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: CV Alfabeta
- Wibawa, Samodra. dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*
- Winarno, Budi. 2002. *Teori Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PAU-Studi Sosial, UGM